

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tantangan bagi pembangunan berkelanjutan suatu negara adalah pertumbuhan penduduk yang pesat dan terus berlanjut. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat mempengaruhi kualitas penduduk itu sendiri akibat dampak yang dapat terjadi diantaranya kemiskinan dan kelaparan, kekurangan gizi balita, kematian ibu dan anak, juga meningkatnya pengangguran (Priyatni dan Rahayu, 2016). *United Nations* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi terbanyak ke-empat setelah China, India dan Amerika (United Nations, 2019).

Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270,20 juta jiwa, dan pada tahun 2021 menjadi 272,68 juta jiwa. Jumlah penduduk terus meningkat jika dibandingkan dengan hasil sensus penduduk pada tahun 2010 yaitu sebanyak 237,63 juta jiwa, dengan peningkatan 32,56 juta jiwa atau rata-rata 3,26 juta setiap tahun. Namun begitu laju pertumbuhan penduduk (LPP) dalam satu dekade terakhir mengalami perlambatan 0,24%, dari 1,49% pada tahun 2010 menjadi 1,25% pada tahun 2020 dan 1,22% pada tahun 2021. Meski mengalami perlambatan, Indonesia tetap berupaya untuk menurunkan LPP menjadi <1,2% pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistik, 2020).

Dalam menekan laju pertumbuhan penduduk, pemerintah berupaya dengan menyelenggarakan program keluarga berencana. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu penggunaan alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur (PUS). Penggunaan kontrasepsi juga bertujuan untuk mengatur kehamilan yang diinginkan, menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak, juga menjarangkan jarak kehamilan (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009). Berdasarkan Rencana Strategis BKKBN 2020-2024, strategi yang dicanangkan yaitu perluasan cakupan KB dengan memfokuskan pada prevalensi metode kontrasepsi modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR*, lebih khusus pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Hal ini berdasarkan hasil analisis bahwa meningkatnya angka mCPR berpengaruh terhadap penurunan angka kelahiran total (BKKBN, 2020).

Pada tahun 2021 cakupan prevalensi nasional penggunaan kontrasepsi modern sebesar 57,1%, sedangkan target yang ditetapkan sebesar 62,16% (BKKBN, 2020). Adapun jenis kontrasepsi yang paling banyak digunakan yaitu metode kontrasepsi suntik (59,91%), diikuti oleh metode pil (15,79%), implan (10%), IUD (7,99%), Metode Operasi Wanita (MOW) (4,19%), kondom (1,84%) dan proporsi paling sedikit yaitu Metode Operasi Pria (MOP) (0,22%) (BKKBN, 2021).

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pilihan kontrasepsi modern lebih banyak ditujukan untuk kelompok wanita, oleh karena itu yang banyak berpartisipasi menjadi akseptor keluarga berencana (KB) yaitu wanita usia subur (WUS). Akseptor atau peserta KB merupakan pasangan usia subur

yang suami atau istrinya sedang memakai atau menggunakan salah satu alat kontrasepsi modern. WUS adalah wanita yang berumur 15-49 tahun baik yang berstatus kawin, belum kawin ataupun janda (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional [BKKBN], 2011).

Berdasarkan data prevalensi nasional penggunaan kontrasepsi modern juga dapat diketahui WUS lebih banyak menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek (Non MKJP), sedangkan yang menjadi target pemerintah yaitu meningkatnya prevalensi MKJP. Metode kontrasepsi jangka pendek memang mudah dalam penggunaannya akan tetapi efektivitasnya memiliki risiko kegagalan yang lebih tinggi daripada MKJP. Kegagalan akibat penggunaan kontrasepsi non MKJP yaitu terjadinya kehamilan pada saat penggunaan alat atau obat kontrasepsi secara benar (BKKBN, 2017a). Kehamilan yang terjadi akan lebih berisiko pada ibu dengan usia di atas 35 tahun atau kurang dari 19 tahun, anak lebih dari tiga, dan jarak kehamilan yang terlalu dekat, karena dapat meningkatkan risiko kematian pada ibu (Kemenkes, 2013) dalam (Aditya, 2019).

Salah satu MKJP yang memiliki efektifitas tinggi dengan tidak adanya efek samping jangka panjang dalam mencegah kehamilan pada WUS yaitu kontrasepsi MOW (Kementerian Kesehatan, 2021). Penggunaan kontrasepsi MOW sesuai untuk pasangan yang telah merasa cukup dengan jumlah anaknya, ibu pasca bersalin, ibu menyusui, WUS yang tidak ingin menggunakan kontrasepsi non-MKJP, WUS yang berisiko jika hamil kembali, dan apabila menggunakan kontrasepsi lain berisiko dengan efek samping yang dialami

(Fitriyah, dkk., 2013). Kontrasepsi MOW meskipun memiliki banyak keuntungan, akan tetapi proporsi penggunaannya paling rendah dibandingkan kontrasepsi lainnya yang digunakan oleh WUS.

Berbanding lurus dengan data prevalensi penggunaan kontrasepsi MOW nasional, penggunaan kontrasepsi MOW di Jawa Barat juga memiliki prevalensi terendah jika dibandingkan dengan MKJP lain yang digunakan oleh WUS, yaitu sebesar 3,45% atau sekitar 159.038 akseptor dari kurang lebih 4,6 juta PUS akseptor KB modern. Sama halnya dengan data prevalensi di Kota Tasikmalaya yang memiliki cakupan akseptor MOW ketiga terendah setelah Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi dengan prevalensi sebesar 1,72% atau sebanyak 1.545 akseptor dari 4.139 ppm (perkiraan permintaan masyarakat). Jumlah PUS peserta KB modern di Kota Tasikmalaya sendiri sebanyak 89.792 PUS. Berdasarkan data yang telah dijabarkan dapat dilihat bahwa tidak ada peningkatan persentase akseptor KB MOW bila dibandingkan data dari cakupan Nasional (4,19%), Jawa Barat (3,45%) dan Kota Tasikmalaya (1,72%) (BKKBN, 2021).

Hal menarik dari data per Kecamatan di Kota Tasikmalaya tahun 2021 yaitu di Kecamatan Tawang cakupan kontrasepsi MOW memiliki persentase lebih tinggi dari cakupan Nasional, Provinsi maupun Kota yaitu sebesar 5,46% atau dengan jumlah akseptor sebanyak 343 orang dari 6.277 PUS peserta KB aktif. Angka ini juga berbeda jauh jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Data akseptor MOW aktif per Kecamatan di Kota Tasikmalaya yaitu Cihideung 240 orang (3,42%), Cipedes 101 orang (0,97%), Indihiang 31 orang (0,50%),

Kawalu 263 orang (2,28%), Cibeureum 126 orang (1,22%), Mangkubumi 154 orang (1,18%), Tamansari 70 orang (0,62%), Bungursari 130 orang (1,70%), dan Purbaratu 87 orang (1,43%) (DPPKBP3A, 2021).

Kelurahan yang memiliki cakupan penggunaan kontrasepsi MOW tertinggi di Kecamatan Tawang berada di Kelurahan Lengkongsari dengan persentase sebesar 5,28% atau sebanyak 84 akseptor MOW dari 1.592 PUS akseptor kontrasepsi modern. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan Balai Penyuluhan Kecamatan Tawang yang menetapkan Kelurahan Lengkongsari sebagai wilayah percontohan untuk akseptor MOW yang disebut dengan Pojok MOW. Akseptor MOW tersebut terbagi kedalam dua kelompok yaitu yang tergabung dari pemerintah sebanyak 67 orang, dan yang tergabung secara mandiri atau swasta sebanyak 17 orang (Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Tawang, 2022). Berdasarkan hasil wawancara terhadap petugas Balai Penyuluhan Kecamatan Tawang mengatakan bahwa salah satu faktor yang berhubungan dengan tingginya proporsi penggunaan kontrasepsi MOW di Kelurahan Lengkongsari selain adanya program pelayanan massal adalah adanya beberapa fasilitas kesehatan yang dapat melayani pelayanan kontrasepsi MOW.

Studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 5 November terhadap 10 orang WUS akseptor MOW di Kelurahan Lengkongsari didapatkan hasil sebanyak 90% berumur lebih dari 35 tahun pada saat awal penggunaan kontrasepsi MOW. Sebanyak 70% memiliki anak lebih dari dua. Sebanyak 70% memiliki indikasi medis. Sebanyak 50% melakukan pelayanan MOW di Rumah

Sakit Umum Daerah, dan 50% lainnya di Rumah Sakit swasta yang dijadikan tempat pelayanan massal MOW. Sebanyak 80% akseptor mendapatkan dukungan dari suami, dan 80% mendapatkan peran dan dukungan dari petugas kesehatan.

Adapun hasil studi pendahuluan terhadap 10 orang WUS akseptor non MOW didapatkan hasil 10% berumur lebih dari 35 tahun pada saat awal penggunaan kontrasepsi yang digunakan saat ini. Sebanyak 10% memiliki anak lebih dari dua. Sebanyak 40% memiliki indikasi medis. Sebanyak 40% menggunakan rumah sakit umum sebagai tempat pelayanan kontrasepsi, 40% ke apotik dan 20% melakukan pelayanan di bidan setempat. Sebanyak 100% mendapatkan dukungan suami, dan 80% mendapatkan peran dan dukungan dari petugas kesehatan.

Menurut Lawrence Green dalam Notoatmodjo (2010) faktor determinan perilaku kesehatan yang dalam hal ini berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi MOW dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu faktor predisposisi, faktor pemungkin dan faktor penguat (Notoatmodjo, 2010). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aditya (2019) diketahui bahwa terhadap hubungan antara umur, indikasi medis, dukungan suami, dan peran petugas kesehatan. Faktor lain yang juga berhubungan dengan metode kontrasepsi MOW yaitu pengetahuan tentang KB dan sikap (Heroyanto dan Amru, 2020), jumlah anak (Febriana dan Wibowo, 2022), kepercayaan (Osborn *et al.*, 2021) dan akses ke fasilitas kesehatan (Mi'rajiah, dkk., 2019).

Berdasarkan data dan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penggunaan Kontrasepsi Metode Operasi Wanita (MOW) Pada Wanita Usia Subur (WUS) Di Kelurahan Lengkongsari Kota Tasikmalaya Tahun 2022”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian data di atas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi metode operasi wanita (MOW) pada wanita usia subur (WUS) di Kelurahan Lengkongsari tahun 2022?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi metode operasi wanita (MOW) pada wanita usia subur (WUS) di Kelurahan Lengkongsari tahun 2022.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Menganalisis hubungan usia terhadap penggunaan kontrasepsi MOW pada WUS di Kelurahan Lengkongsari tahun 2022.
- b. Menganalisis hubungan kepercayaan terhadap penggunaan kontrasepsi MOW pada WUS di Kelurahan Lengkongsari tahun 2022.
- c. Menganalisis hubungan jumlah anak terhadap penggunaan kontrasepsi MOW pada WUS di Kelurahan Lengkongsari tahun 2022.
- d. Menganalisis hubungan indikasi medis terhadap penggunaan kontrasepsi MOW pada WUS di Kelurahan Lengkongsari tahun 2022.

- e. Menganalisis hubungan dukungan suami terhadap penggunaan kontrasepsi MOW pada WUS di Kelurahan Lengkongsari tahun 2022.

#### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

##### **1. Lingkup Masalah**

Masalah penelitian ini dibatasi hanya pada faktor yang berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi metode operasi wanita (MOW) pada WUS akseptor KB di Kelurahan Lengkongsari tahun 2022.

##### **2. Lingkup Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan *case control*.

##### **3. Lingkup Keilmuan**

Materi keilmuan pada penelitian ini mengacu pada Ilmu Kesehatan Masyarakat khususnya peminatan promosi kesehatan.

##### **4. Lingkup Lokasi**

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.

##### **5. Lingkup Sasaran**

Sasaran penelitian ini yaitu WUS akseptor KB aktif pemerintah di Kelurahan Lengkongsari tahun 2022.

##### **6. Lingkup Waktu**

Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2022 - Maret 2023.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang**

Memberikan informasi mengenai faktor yang berhubungan dengan penggunaan metode kontrasepsi MOW di wilayah kerjanya, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan pertimbangan terhadap pengembangan dan evaluasi program kerja.

### **2. Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi**

Memberikan informasi untuk menambah referensi dalam menunjang kepentingan pendidikan dan penelitian khususnya dalam bidang promosi kesehatan dan kesehatan reproduksi.

### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi terkait topik penelitian kontrasepsi MOW juga menjadi bahan pengembangan penelitian lebih lanjut.